

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 43 TAHUN 2009 SERI D.24

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 43 TAHUN 2009

TENTANG

**ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN
PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN
KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 4017);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
9. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Tanbunakhut adalah Unit Pelaksana Teknik Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala UPT Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
13. Pelaksana Administrasi adalah Pelaksana Administrasi pada UPT Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
14. Pelaksana Teknis adalah petugas yang melaksanakan kegiatan teknis UPT Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT Tanbunakhut adalah unsur pelaksana teknis di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan.
- (2) UPT Tanbunakhut dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3

UPT Tanbunakhut mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam hal melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan.

BAB IV
FUNGSI
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT Tanbunakhut mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengendalian urusan ketatausahaan UPT Tanbunakhut;
- b. pelaksanaan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan teknis operasional di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pengendalian teknis fungsional di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Tanbunakhut;
- f. penyiapan bahan penyusunan data statistik pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan di wilayah kerjanya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Tanbunakhut terdiri atas :
 - a. Kepala UPT.
 - b. Pelaksana Administrasi.
 - c. Pelaksana Teknis.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi

Paragraf Pertama
Kepala UPT
Pasal 6

- (1) UPT Tanbunakhut dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT Tanbunakhut di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan perencanaan dan program UPT Tanbunakhut;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan di wilayah kerja;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT Tanbunakhut; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Tanbunakhut.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT mempunyai uraian tugas :
- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas termasuk membina dan mengendalikan kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Tanbunakhut;
 - b. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPT Tanbunakhut;
 - c. menyusun rencana dan program kerja UPT Tanbunakhut, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - e. membina dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas;
 - f. menyusun rencana pendayagunaan fasilitas UPT Tanbunakhut;
 - g. menyusun rencana pengembangan kualitas pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
 - h. melaksanakan pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
 - i. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan lingkup UPT Tanbunakhut;
 - j. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas UPT Tanbunakhut di wilayah kerjanya, sebagai bahan pengambilan keputusan/ kebijakan;
 - k. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberikan penilaian dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3);
 - l. menyusun evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Tanbunakhut, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua

Pelaksana Administrasi

Pasal 7

- (1) Pelaksana Administrasi adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan tugas administrasi UPT Tanbunakhut.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Administrasi mempunyai uraian tugas :
 - a. membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas urusan administrasi;

- b. menyiapkan bahan untuk menyusun program kerja UPT Tanbunakhut, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi;
- d. melaksanakan urusan kepegawaian;
- e. melaksanakan urusan keuangan;
- f. melaksanakan urusan penyediaan sarana dan rumah tangga UPT Tanbunakhut;
- g. melaksanakan pengadministrasian kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Tanbunakhut;
- h. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala UPT yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Ketiga
Pelaksana Teknis
Pasal 8

- (1) Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas teknis pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis mempunyai uraian tugas:
 - a. membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas urusan pelaksanaan teknis pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
 - b. menyusun rencana program kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
 - c. menyiapkan bahan pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
 - d. merencanakan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak UPT Tanbunakhut;
 - e. melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
 - f. melaksanakan pemasaran program, fasilitas dan hasil pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
 - g. melaksanakan pelayanan informasi dan konsultasi pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
 - h. melaksanakan evaluasi program pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
 - i. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala UPT yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 11

UPT Tanbunakhut berjumlah sebanyak 16 (enam belas) Wilayah Kerja, terdiri dari:

1. UPT Tanbunakhut Palimanan, berkedudukan di Kecamatan Palimanan, dengan wilayah kerja meliputi:
 - a. Kecamatan Ciwaringin;
 - b. Kecamatan Gempol; dan
 - c. Kecamatan Palimanan.
2. UPT Tanbunakhut Klangeran, berkedudukan di Kecamatan Klangeran, dengan wilayah kerja meliputi:
 - a. Kecamatan Jamblang; dan
 - b. Kecamatan Klangeran.
3. UPT Tanbunakhut Gegesik, berkedudukan di Kecamatan Gegesik dengan wilayah kerja meliputi:
 - a. Kecamatan Gegesik; dan
 - b. Kecamatan Kaliwedi.
4. UPT Tanbunakhut Arjawinangun, berkedudukan di Kecamatan Arjawinangun dengan wilayah kerja meliputi:
 - a. Kecamatan Susukan; dan
 - b. Kecamatan Arjawinangun.
5. UPT Tanbunakhut Panguragan, berkedudukan di Kecamatan Panguragan dengan wilayah kerja meliputi:
 - a. Kecamatan Panguragan; dan
 - b. Kecamatan Kapetakan.
6. UPT Tanbunakhut Suranenggala, berkedudukan di Kecamatan Suranenggala dengan wilayah kerja meliputi:
 - a. Kecamatan Suranenggala; dan
 - b. Kecamatan Gunungjati.

7. UPT Tanbunakhut Plered, berkedudukan di Kecamatan Plered dengan wilayah kerja meliputi:
 - a. Kecamatan Weru;
 - b. Kecamatan Plered;
 - c. Kecamatan Tengah Tani; dan
 - d. Kecamatan Kedawung.
8. UPT Tanbunakhut Dukupuntang, berkedudukan di Kecamatan Dukupuntang dengan wilayah kerja meliputi:
 - a. Kecamatan Sumber;
 - b. Kecamatan Depok;
 - c. Kecamatan Dukupuntang; dan
 - d. Kecamatan Plumbon.
9. UPT Tanbunakhut Astanajapura, berkedudukan di Kecamatan Astanajapura dengan wilayah kerja meliputi:
 - a. Kecamatan Astanajapura; dan
 - b. Kecamatan Greged.
10. UPT Tanbunakhut Mundu, berkedudukan di Kecamatan Mundu dengan wilayah kerja meliputi:
 - a. Kecamatan Mundu; dan
 - b. Kecamatan Pangenan.
11. UPT Tanbunakhut Lemahabang, berkedudukan di Kecamatan Lemahabang dengan wilayah kerja meliputi:
 - a. Kecamatan Lemahabang; dan
 - b. Kecamatan Susukan Lebak.
12. UPT Tanbunakhut Beber, berkedudukan di Kecamatan Beber dengan wilayah kerja meliputi:
 - a. Kecamatan Beber;
 - b. Kecamatan Talun; dan
 - c. Kecamatan Sedong.
13. UPT Tanbunakhut Karangwareng, berkedudukan di Kecamatan Karangwareng dengan Wilayah kerja meliputi:
 - a. Kecamatan Karangwareng; dan
 - b. Kecamatan Karangsembung.
14. UPT Tanbunakhut Waled, berkedudukan di Kecamatan Waled dengan Wilayah kerja meliputi:
 - a. Kecamatan Pabuaran;
 - b. Kecamatan Waled; dan
 - c. Kecamatan Pasaleman.
15. UPT Tanbunakhut Babakan, berkedudukan di Kecamatan Babakan dengan Wilayah kerja meliputi:
 - a. Kecamatan Gebang; dan
 - b. Kecamatan Babakan.
16. UPT Tanbunakhut Pabedilan, berkedudukan di Kecamatan Pabedilan dengan Wilayah kerja meliputi:
 - a. Kecamatan Pabedilan;
 - b. Kecamatan Losari; dan
 - c. Kecamatan Ciledug.

BAB VIII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 12

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT Tanbunakhut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT secara operasional berada di bawah koordinasi Camat.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 13

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas dan tembusan kepada Camat.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Administrasi.
- (2) Dalam hal Pelaksana Administrasi berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pejabat Fungsional.

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 15

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT berkewajiban dan bertanggungjawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Pembiayaan UPT Tanbunakhut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 55 Tahun 2005 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian pada Dinas Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

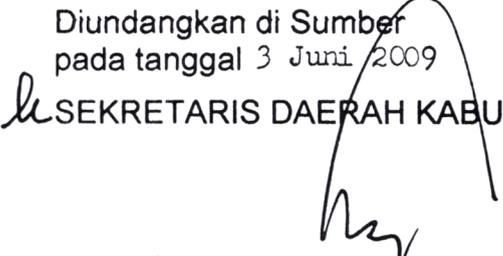
Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Mei 2009

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Juni 2009

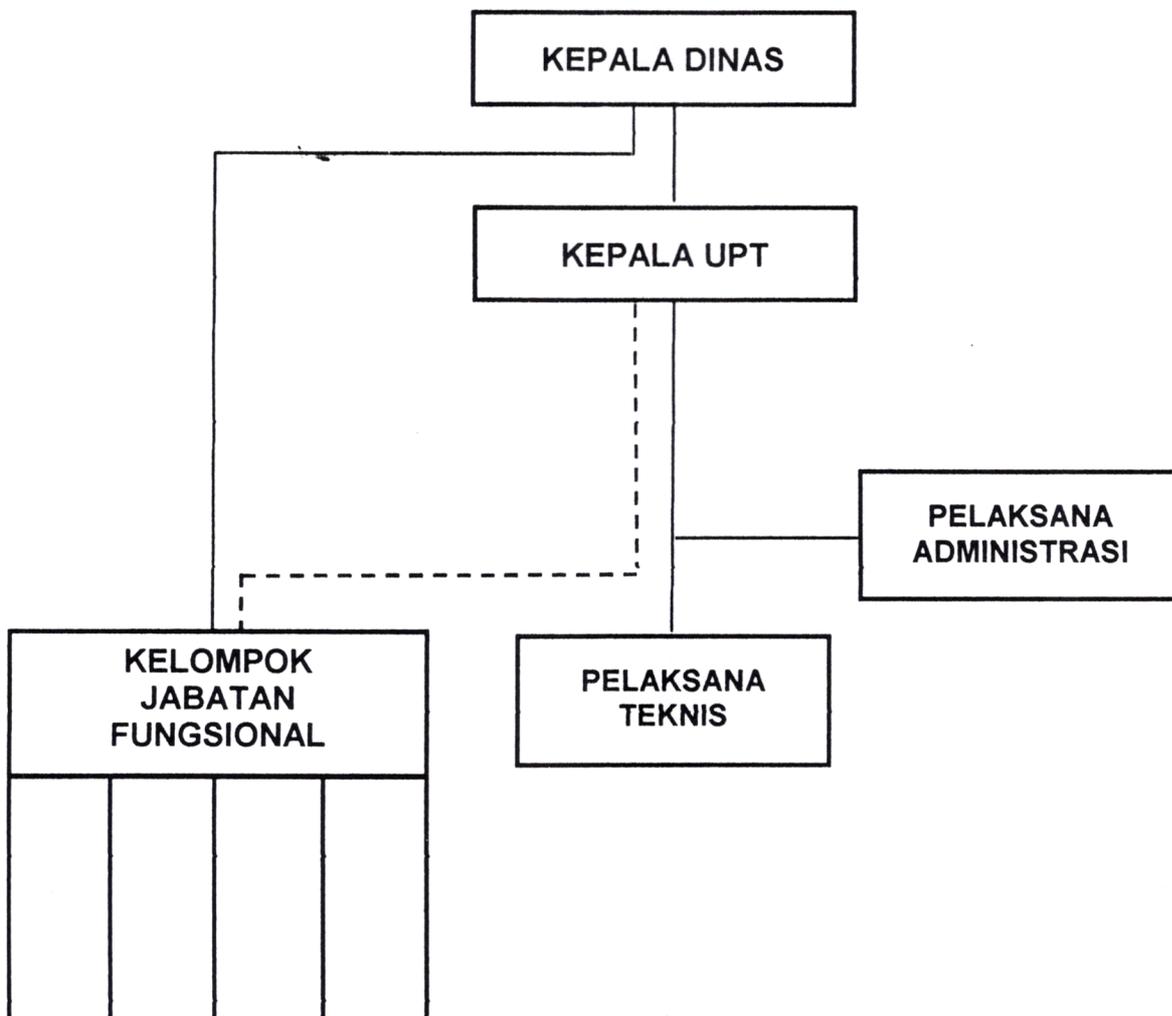

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 2

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 43 SERI D.24

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 43 Tahun 2009
TANGGAL : 29 Mei 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN**



BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 43 SERI D.24